

# Sejarah dan Perkembangan DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN BAHARKAM POLRI



Para Pejabat Negara, dengan pandangan jauh ke depan telah mengeluarkan Keputusan-keputusan yang strategis berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.4/2/3/Um, tanggal 14 Maret 1951 tentang Penetapan Polisi Perairan sebagai Bagian dari Djawatan Kepolisian Negara terhitung mulai tanggal 1 Desember 1950. Dengan lahirnya Djawatan Polisi Perairan maka seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di khatulistiwa, ditengah hamparan laut Indonesia yang sangat luas telah diantisipasi perlunya pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum. Pada awal masa tugasnya, Polisi Perairan



dilengkapi dengan satu unit kapal Angkloeng dan beberapa motor boat dengan pusat kegiatan di daerah Jakarta dan sekitarnya. Kapal Angkloeng merupakan kapal pertama Djawatan Polisi Perairan pada awal masa tugasnya dengan pusat kegiatan di daerah Jakarta dan sekitarnya.

Pada tahun 1953 s/d 1958 berdasarkan Surat Perintah KKN No. Pol. : 2 / XIV/ 53, tanggal 16 Januari 1953 dibentuk 2 (dua) Pangkalan Polisi Perairan masing-masing di Belawan dan Surabaya. Terdorong dari kesulitan-kesulitan yang sering timbul dikarenakan kondisi geografis wilayah Nusantara maka dibentuklah Polisi Udara dengan SK Perdana Menteri Nomor. : 510.PM/1956 tanggal 5 Desember 1956, maka resmilah tanggal 1 Desember 1956 nama bagian Polisi Perairan dan Polisi Udara yang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi RP. SUDARSONO, dengan memiliki 35 kapal dari berbagai type dan sebuah pesawat jenis Cessna-180. Dengan Armada yang dimiliki Polisi Perairan dan Udara ikut serta dalam pemberantasan penyelundupan, bajak laut dan operasi-operasi militer seperti pemberantasan DI/TII di Aceh dan Pantai Karawang Jawa Barat.

Setelah melalui beberapa kali perombakan, penyempurnaan organisasi baru terjadi pada tahun 1985. Satuan Utama Pol Air dilebur ke dalam Subditpol Air dan Satuan Utama Pol Udara menjadi Subditpol Udara. Kedua subdirektorat ini beroperasi dibawah kendali Direktorat Samapta Polri.



Dengan pertimbangan perkembangan situasi dan berdasarkan Skep Kapolri No. Pol.: Skep/ 9/V/ 2001, tanggal 25 Mei 2001 struktur Polairud dibawah Deops Kapolri dengan sebutan Dit Polairud Deops Polri.

Pada saat bulan Oktober 2002 terjadi Validasi Organisasi dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep /53/ X/ 2002, tanggal 17 Oktober 2002 dengan sebutan Dit Polair Babinkam Polri.

Pada bulan Oktober 2010 terjadi Restrukturisasi organisasi ditubuh Polri dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor. 52 Tahun 2010, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor. 21 Tahun 2010 Tanggal 14 Oktober 2010 untuk tingkat Mabes Polri dan Peraturan Kapolri Nomor. 22 Tanggal 14 Oktober 2010 untuk tingkat Kepolisian Daerah.

Hingga akhirnya berpedoman kepada sejarah kelahirannya, 1 Desember diputuskan sebagai hari Ulang Tahun Polairud.

Berdasarkan Skep Kapolri No.Pol.: SKEP / 488 / X / 2009, tanggal 17 Oktober 2009, Brigjen Pol Drs. Budi Hartono Untung menjabat sebagai Direktur Polair Babinkam yang baru sampai dengan sekarang.

Dalam melanjutkan tugas pokok Polisi Perairan tersebut selaku pimpinan yang baru selalu mengoptimalkan tugas-tugas dengan menggunakan alat yang dimiliki saat ini yaitu sebanyak 56 unit kapal patroli polisi.



## A. KEMAMPUAN DIREKTORAT POLAIR BAHARKAM POLRI

Kemampuan Dit Polair Baharkam Polri yang ada adalah guna menjawab atas ancaman kejahatan beserta modus operandinya yg selalu berubah-ubah dengan selalu mengedepankan pelaksanaan yang proporsional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi supremasi hukum serta hak asasi manusia.

### 1. KEMAMPUAN FUNGSI UMUM KEPOLISIAN (Investigation Skill)

- a. PENYELIDIKAN
- b. PENYIDIKAN
- c. POLMAS PERAIRAN
- d. KERJASAMA

### 2. KEMAMPUAN DIBIDANG KEMATRAAN POLAIR (Special Skill)

- a. NAUTIKA
- b. TEHNIKA
- c. KOMLEK
- d. RANCANG BANGUN KAPAL
- e. SELAM
- f. SAR



Disusun oleh Ruri Prastowo,  
Sindikat B.





# POLISI SATWA

## Cikal Bakal dan Perkembangannya

Dalam berbagai catatan sejarah banyak kita temui bahwa satwa khususnya anjing menjadi bagian bala tentara dan aparat keamanan. Bahkan sejak jaman Romawi Kuno satwa telah mempunyai peran besarsebagai alat perang yang layak diperhitungkan. Negara negara besar seperti Amerika Serikat dan Jerman pun sudah sejak lama memanfaatkan kecerdikan anjing dalam membantu tentara dan kepolisian dalam berbagai misinya. Hingga zaman sekarang kemampuan dan kepintaran anjing telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aparat keamanan di banyak negara.

Berkaca dari hal itu dan demi melengkapi persenjataan aparat keamanan, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat itu baru saja merdeka berinisiatif membentuk satuan kepolisian yang dipersenjatai satwa anjing. Cikal bakal kesatuan ini diawali di Karesidenan Malang pada 1952 Kepala Kepolisian Kota Malang merintis pemanfaatan anjing sebagai bagian dari kepolisian. Berawal dengan kekuatan empat ekor anjing ras Bouvier dan satu ekor anjing German Shepherd yang dilatih oleh wanita berkebangsaan Jerman, Ms. Roll Moll, mulailah satwa anjing ditugaskan untuk membantu menyelesaikan kasus – kasus di wilayah kepolisian Republik Indonesia.

Dalam beberapa tahun kemudian jumlah anjing yang digunakan mulai bertambah. Pada 1957 tujuh ekor anjing yang bertugas di Malang dipindahkan ke kepolisian Kelapa Dua, Depok Jawa Barat. Saat itu kepolisian Kelapa dua hanya mempunyai satu personel polisi, Posumah, dan empat personel Pegawai Harian Lepas ( PHL ), Panio, Giarto, Suyudi dan Damahudi yang kemudian diangkat menjadi polisi pada 1966. Tidak lama kemudian di wilayah ini dibangun perumahan dan kennel atas instruksi Kepala Jawatan Kepolisian.

Pada 4 Juli 1959 Kepala Jawatan Kepolisian memerintahkan Kepala seksi kejahatan dinas reserse kriminal berdasarkan surat bernomor 128/VII/1959 untuk membentuk sub seksi brigade anjing dinas kepolisian ( BADK / DRK ). Subseksi ini berkedudukan di bawah seksi kejahatan dinas reserse kriminal yang dipimpin AKP. R. Soedhono dan dibantu oleh AKP. R. J Soedarjanto sebagai wakil. Saat itu para pejabat

